



AKOMODASI KEBUTUHAN HUNIAN YANG AMAN DAN NYAMAN

Kampung Vertikal Jadi Solusi di Lahan Sempit

YOGYA (KR) - Kampung vertikal atau rumah susun bisa menjadi solusi kebutuhan hunian yang aman dan nyaman di lahan sempit seperti Kota Yogya. Terutama dengan memanfaatkan lahan milik pemerintah maupun kasultanan yang kemudian diberlakukan sistem sewa.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Yogya Agus Tri Haryono, menjelaskan pemerintah memiliki kewenangan dalam memfasilitasi perumahan yang sehat, aman, harmonis dan berkelanjutan. "Kewenangan itu bahkan sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman," jelasnya, Selasa (13/8).

Menurutnya, pesatnya pertumbuhan penduduk di perkotaan, secara alami maupun urbanisasi menyebabkan peningkatan kebutuhan hunian di perkotaan. Namun keterbatasan lahan menjadi tantangan krusial yang sedang dihadapi untuk pemenuhan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat khususnya di Kota Yogya. Agus mengungkapkan, untuk mengatasi permasalahan terkait penyediaan perumahan dan infrastruktur permukiman diperlukan kolaborasi multi aktor, multi program dan multi sektor yang saling menguntungkan antara akademisi, pengusaha, komunitas dan pemerintah.

Untuk itu Pemkot Yogya akan terus

berupaya dalam menangani dan meningkatkan kualitas permukiman kumuh dengan memanfaatkan segala potensi yang ada. Baik melalui pemugaran dengan konsep Mundur Mungah Madhep Kali (M3K) maupun melalui terobosan terbaru peremajaan kawasan dengan konsolidasi lahan.

"Dengan upaya yang sudah dilakukan, telah memperlihatkan hasil yang cukup positif dan masih menyisakan luasan kumuh sebesar 80,94 hektare atau sudah mengalami penurunan sebesar 33,78 hektare sejak penetapan SK Kumuh terakhir di tahun 2021," ujarnya.

Berdasarkan data tahun 2023, jumlah Rumah Tidak Layak Humi (RTLH) di Kota Yogya yang membutuhkan penanganan menurun secara signifikan. Dari 2.027 RTLH di tahun 2022 kini menyisakan 1.811 RTLH yang bakal ditangani melalui dana dari pusat, APBD DIY, APBD Kota Yogya maupun melalui CSR.

Untuk itu, Agus berharap kolaborasi tidak hanya dari pemerintah saja tetapi bersama masyarakat dan lemb

ga swasta dalam rangka arah kebijakan penyediaan akses perumahan dan permukiman yang layak, aman dan terjangkau.

"Sehingga harapannya dapat meningkatkan akses masyarakat secara bertahap terhadap perumahan layak, aman dan terjangkau untuk mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh," jelasnya.

Pihaknya menyebutkan, akan ada tiga strategi yang dilakukan yakni melalui pendekatan dari sisi permintaan atau demand side, dari sisi pasokan atau supply side, dan enabling environment. Dengan keterbatasan lahan yang ada Pemkot Yogya nantinya juga akan berupaya untuk mengusulkan pembangunan rumah susun sederhana sewa pada lahan-lahan sempit atau terbatas dengan jumlah 12 hingga 16 unit hunian.

Selain itu, diharapkan efisiensi penggunaan lahan juga akan dilakukan melalui pembangunan kampung vertikal di atas lahan Sultan Ground (SG). Namun pada lokasi permukiman kumuh yang tidak dapat diselesaikan dengan pola pemugaran, maka diperlukan konsolidasi lahan terutama pada lokasi di tanah-tanah kasultanan. "Untuk itu, dukungan Kraton Ngayogyakarta dan Kantor Pertanahan Kota Yogya sangat penting pada kegiatan yang akan dilakukan pemerintah ke depannya," ungkapnya. **(Dhi)-f**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Badan Perencanaan Pembangunan	Netral	Biasa	Untuk Ditanggapi

Yogyakarta, 03 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005